

Formalisasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Simpanglima Semarang

Octora Lintang Surya¹

Diterima : 14 Mei 2013

Disetujui : 3 Juni 2013

ABSTRACT

Semarang City is one of the cities that are currently paying more attention to the informal sector especially street vendors (PKL-Pedagang Kaki Lima). The government attentions has been formulated as policy in form of street vendor's arrangement program, which one of it is in Simpang Lima. In this setting, there are indications of attempts to formalize the activities of street vendors. There phenomena can be pursued into a research question which is the indications to formalize the activities of street vendors? The objectives of this research are to identify existing conditions of PKL activity, identifying vendors and visitor profiles, identifying the characteristics activities of street vendors and visitors perception of the existence of street vendors and formulating indications to formalize the activities of street vendors. The used method in this study is a quantitative approach supported by quantitative descriptive analysis tools, as well as the frequency distribution method and crosstab method. According to the profile of street vendors, it is indicates that street vendors bussiness can be one of the major alternative livelihoods. In the analysis of the PKL activities characteristics, it is founded that there is a shifting characteristics of street vendors. While for the visitor profile analysis, it is found that PKL visitors come from all kinds of jobs, income level and educational background. Final formulation suggests that indicated a formalization of street vendors who have shifted the paradigm of the characteristics of a classic street vendor activity.

Key words : to formalize, street vendors, characteristics of activity

ABSTRAK

Kota Semarang merupakan salah satu kota yang sedang memberi perhatian lebih kepada sektor informal khususnya PKL. Perhatian pemerintah tersebut dirumuskan dalam kebijakan berupa program penataan yaitu salah satunya di Simpanglima. Dalam penataannya, terdapat indikasi adanya upaya formalisasi PKL Simpanglima. Fenomena tersebut dapat dikerucutkan menjadi pertanyaan penelitian yaitu bagaimana indikasi formalisasi aktivitas PKL di Simpanglima Semarang? Sasaran yang dilakukan adalah mengidentifikasi kondisi eksisting aktivitas PKL, mengidentifikasi profil PKL dan pengunjung, mengidentifikasi karakteristik aktivitas PKL dan persepsi pengunjung terhadap keberadaan PKL serta merumuskan indikasi formalisasi aktivitas PKL. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang didukung dengan alat analisis yaitu deskriptif kuantitatif, distribusi frekuensi serta metode crosstab (tabulasi silang). Menurut profil PKL, bahwa usaha PKL dapat menjadi salah satu alternatif mata pencaharian utama masyarakat. Pada analisis karakteristik aktivitas PKL diketahui telah terjadi pergeseran karakteristik PKL. Sedangkan profil pengunjung PKL bahwa pengunjung PKL berasal dari segala jenis pekerjaan, tingkat penghasilan dan latar belakang pendidikan. Rumusan akhir menunjukkan bahwa terindikasi adanya formalisasi aktivitas PKL yang telah menggeser paradigma karakteristik aktivitas PKL klasik.

Kata kunci : formalisasi, pedagang kaki lima, karakteristik aktivitas

¹ Mahasiswa Magister Pembangunan Wilayah dan Kota, Undip, Semarang, Jawa Tengah
Kontak Penulis : octorals@yahoo.com

PENDAHULUAN

Permasalahan dalam perencanaan serta pembangunan wilayah dan kota merupakan fenomena yang sering ditemui negara-negara di dunia tidak terkecuali di Indonesia. Salah satu penyebabnya bermula dari berkembangnya konsep dualistik. Pada aspek sosial-ekonomi masyarakat kota tercipta kegiatan yang bersifat formal dan informal sedangkan pada aspek fisik kota, dualistik tersebut terjadi pada pembauran pola dan struktur rancang kota antara modern dan tradisional yang berbaur secara integral (Sujarto dalam Widjayanti, 2000). Berbagai permasalahan yang timbul akibat dari adanya sifat dualistik dalam perekonomian juga menimpa Kota Semarang. Salah satu permasalahan yang ditimbulkan dalam hubungannya dengan model dualistik pasar tenaga kerja di perkotaan yang menggunakan istilah sektor informal dan sektor formal, pedagang kaki lima nampaknya akan menjadi jenis pekerjaan yang penting dan relatif khas dalam sektor informal. (Yustika, 2000:230).

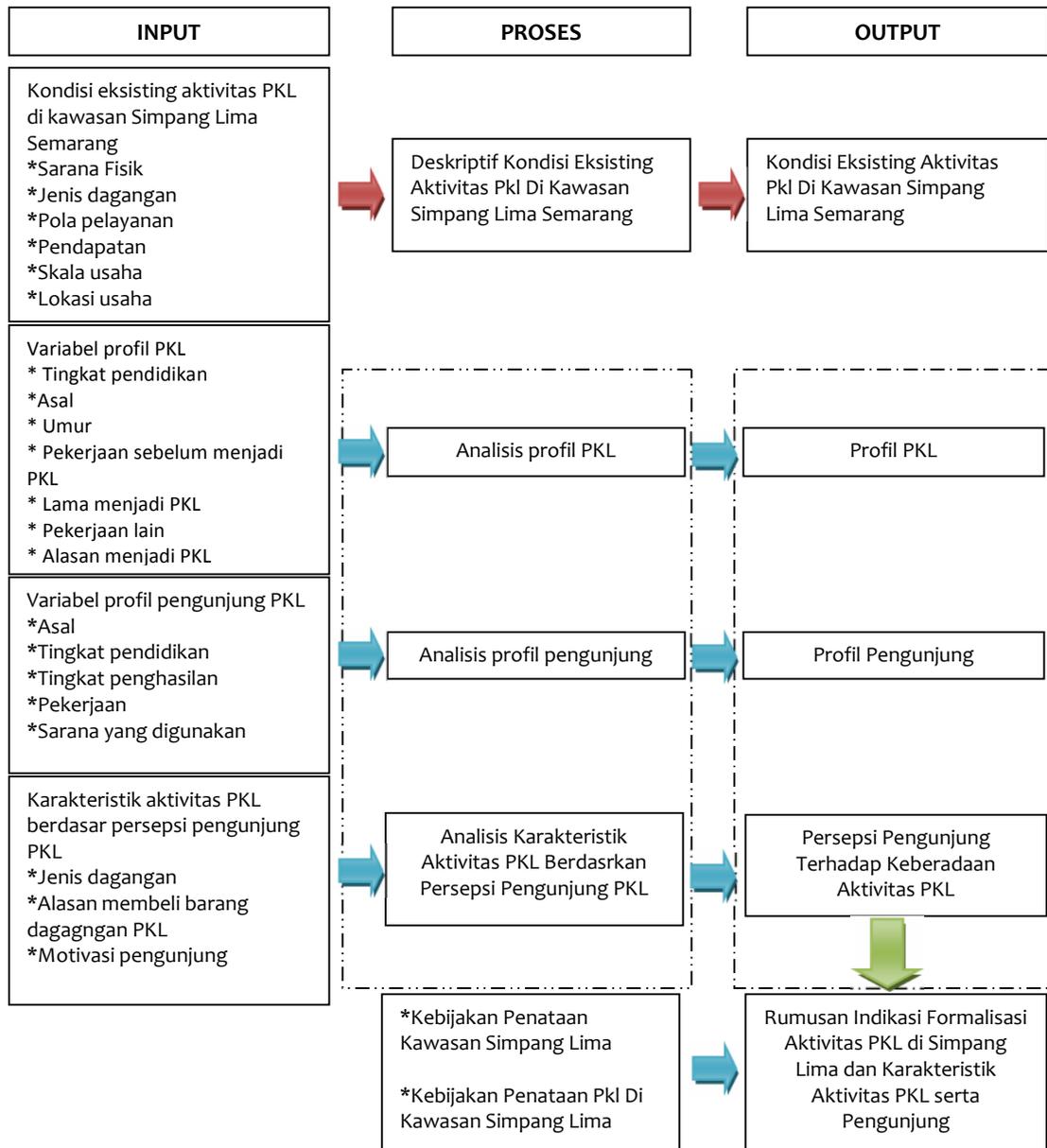
Sektor informal yang terwakili oleh kegiatan pedagang kaki lima yang selanjutnya dikenal dengan istilah PKL. Kehadiran PKL mulai menimbulkan konflik ketika menempati ruang-ruang publik seperti trotoar untuk pedestrian ways, di bahu jalan, taman atau ruang hijau dan di atas saluran drainase yang dianggap strategis secara ekonomis. Terganggunya sendi-sendi kegiatan kota akibat berkembangnya kegiatan PKL yang tidak tertata, menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan kota. Pengertian PKL dalam Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 11 tahun 2000 yang tertuang pada pasal 1, adalah pedagang yang didalam usahanya mempergunakan sarana yang mudah dibongkar pasang/dipindahkan serta mempergunakan bagian jalan/trotoar, dan tempat-tempat untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukkan tempat usaha atau tempat lain yang bukan miliknya.

Ketidakteraturan lokasi aktivitasnya yang diakibatkan oleh bentukan fisik yang beragam dan sering apa adanya dan kumuh berupa kios-kios kecil dan gelaran dengan alas seadanya, menjadikan visual suatu kawasan perkotaan yang telah direncanakan dan dibangun dengan teratur, menjadi terkesan kumuh dan tidak teratur sehingga menurunkan citra suatu kawasan dan merusak wajah perkotaan. Terkait dengan permasalahan tersebut, pemerintah Kota Semarang yang mengalami fenomena ketidakteraturan PKL merumuskan kebijakan berupa penataan PKL. Penataan PKL di Kota Semarang menjadi salah satu alternatif pemecahan masalah perkembangan PKL di ruang perkotaan salah satunya PKL yang menempati kawasan sekitar Simpanglima Semarang. Pada tahun 2010 dibawah kekuasaan Walikota Soemarmo, kawasan Simpanglima Semarang mengalami penataan, baik pada sisi taman terbuka maupun di trotoar. PKL yang dahulu berjualan di atas trotoar direlokasi sementara ke Jalan Imam Barjo, Taman KB serta Jalan Admodirono. Kemudian di awal tahun 2012, ketika penataan kawasan Simpanglima Semarang telah selesai dan PKL yang awalnya beraktivitas di kawasan tersebut dikembalikan ke tempat semula.

Fenomena tersebut mengarah pada dugaan telah adanya upaya untuk memformalisasi sektor informal yang berimbas pada perubahan karakteristik aktivitas PKL. Ciri-ciri atau karakteristik aktivitas sektor informal yang umumnya terjadi di perkotaan telah mengalami beberapa perubahan. Dari penjabaran tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji adanya perubahan fenomena tersebut dengan *research question* yaitu “Bagaimanakah indikasi formalisasi aktivitas PKL di Simpanglima Semarang?”. Sehingga dari penelitian tersebut dapat diketahui apakah terdapat indikasi formalisasi sektor informal khususnya PKL di Simpanglima Semarang serta karakteristik PKL di Simpanglima Semarang pasca penataan kawasan Simpanglima Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah indikasi formalisasi PKL di Simpanglima Semarang serta karakteristik PKL di Simpanglima Semarang pasca penataan.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian ini bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Moh Nasir, 1988). metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada kerangka analisis berikut ini



Sumber: Hasil Analisis, 2013

GAMBAR 1
DIAGRAM ANALISIS

KAJIAN KARAKTERISTIK PKL

Konsep informalitas perkotaan tidak terlepas dari dikotomi sektor formal dan sektor informal yang mulai dibicarakan pada awal tahun 1970-an. Konsep informal diperkenalkan pertama kali oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) pada tahun 1973 dalam laporan resmi tentang misi tenaga kerja di Kenya. Namun konsep tersebut hingga hari ini masih diperdebatkan dimana hal tersulit dalam debat tersebut adalah membuat persetujuan dalam menyusun batas nyata antara sektor informal dan sektor formal. Menurut Dr. Hidayat (dalam Soetomo, 1997:19-28), karakteristik pedagang sektor informal adalah kegiatan yang tidak terorganisir karena mereka tidak melalui institusi yang formal, pada umumnya mereka tidak punya izin, tidak mempunyai jadwal kerja yang tetap maupun tempat yang tetap, pada umumnya politik pemerintah untuk sektor tersebut belum sepenuhnya berhasil, dapat menukar dengan mudah ke pekerjaan lain, menggunakan teknologi sederhana, kapitalnya berasal dari sumber personal, produk-produk dan pelayanannya dikonsumsi kepada golongan masyarakat lapisan bawah.

ILO mengidentifikasi sedikitnya tujuh karakter yang membedakan kedua sektor tersebut, yaitu kemudahan untuk masuk (*ease of entry*), kemudahan untuk mendapatkan bahan baku, sifat kepemilikan, skala kegiatan, penggunaan tenaga kerja dan teknologi, tuntutan keahlian, dan deregulasi dan kompetisi pasar. Untuk menggambarkan interelasi atau hubungan antara sektor informal dan formal dalam wacana *urban economic* menurut pendekatan *the benign relationship approach*, pendekatan sektor informal adalah upaya angkatan kerja yang tidak dapat ditampung pada kegiatan yang produktif kemudian menciptakan lapangan kerja sendiri untuk mendapatkan penghasilan. Hubungan dengan sektor formal secara prinsip tidak mengganggu. Sektor informal lalu dipandang sebagai kegiatan yang perlu dikembangkan dengan mengintegrasikannya dalam sektor formal. Sektor ekonomi tersebut dapat saling mendukung dan saling mengisi, bahkan dimungkinkan untuk terjadinya formalisasi bagi sektor informal (Mustafa, 2008:18). Namun PKL adalah salah satu moda dalam transformasi perkotaan yang tidak terpisahkan dari sistem ekonomi perkotaan. Masalah yang muncul berkenaan dengan PKL ini adalah banyak disebabkan oleh kurangnya ruang untuk mewadahi kegiatan PKL di perkotaan. Konsep perencanaan ruang perkotaan yang tidak didasari oleh pemahaman informalitas perkotaan sebagai bagian yang menyatu dengan sistem perkotaan akan cenderung mengabaikan tuntutan ruang untuk sektor informal termasuk PKL (Deden Rukmana, 2005). Pengertian PKL dalam Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 11 tahun 2000 yang tertera pada pasal 1, adalah pedagang yang didalam usahanya mempergunakan sarana yang mudah dibongkar pasang/dipindahkan serta mempergunakan bagian jalan/trotoar, dan tempat-tempat untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukkan tempat usaha atau tempat lain yang bukan miliknya. Di dalam penelitian ini, peneliti menerjemahkan PKL sebagai pedagang yang didalam usahanya mempergunakan bagian jalan/trotoar, dan tempat-tempat untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukkan tempat usaha atau tempat lain yang bukan miliknya.

Karakteristik aktivitas PKL dapat ditinjau baik dari sarana fisik, pola penyebaran dan pola pelayanan dalam ruang perkotaan. Karakteristik dari PKL dijabarkan oleh Simanjutak (1989:44) sebagai berikut:

1. Aktivitas usaha yang relatif sederhana dan tidak memiliki sistem kerjasama yang rumit dan pembagian kerja yang fleksibel.
2. Skala usaha relatif kecil dengan modal usaha, modal kerja dan pendapatan yang umumnya relatif kecil.
3. Aktivitas yang tidak memiliki izin usaha.

Sedangkan Mustafa (2008:42) dalam bukunya berpendapat bahwa PKL memiliki karakteristik yang khas, yaitu:

1. Pola persebaran PKL umumnya mendekati pusat keramaian dan tanpa ijin menduduki zona-zona yang semestinya menjadi milik publik (*depriving public space*).
2. Para PKL umumnya memiliki daya resistensi sosial yang sangat lentur terhadap berbagai tekanan dan kegiatan penertiban.
3. Sebagai sebuah kegiatan usaha, PKL umumnya memiliki mekanisme involutif penyerapan tenaga kerja yang sangat longgar.
4. Sebagian besar PKL adalah kaum migrant dan proses adaptasi serta eksistensi mereka didukung oleh bentuk-bentuk hubungan patronase yang didasarkan pada ikatan daerah asal.
5. PKL rata-rata tidak memiliki ketrampilan dan keahlian alternatif untuk mengembangkan kegiatan usaha baru luar sektor informal kota.

GAMBARAN UMUM PKL DI SIMPANGLIMA

Image tentang Kota Semarang tidak terlepas dari keberadaan kawasan Simpanglima yang dari masa ke masa mengalami perubahan yang signifikan. Kawasan Simpanglima dan sekitarnya merupakan pusat kegiatan olahraga dan perkantoran. Kemudian kawasan ini berkembang dengan kecenderungan ke arah perekonomian perdagangan dan jasa. Seiring dengan perkembangan tersebut maka akan terjadi dampak pada perkembangan kawasan diantaranya adalah merebaknya sektor informal yang ditandai dengan banyaknya para pedagang kaki lima di kawasan Simpanglima. PKL di Simpanglima keberadaannya diawali pada tahun 1971 (UPD PPKL Kota Semarang, 1998/1999:1-5) dengan adanya PKL yang berjualan di depan pusat pertokoan Simpanglima.

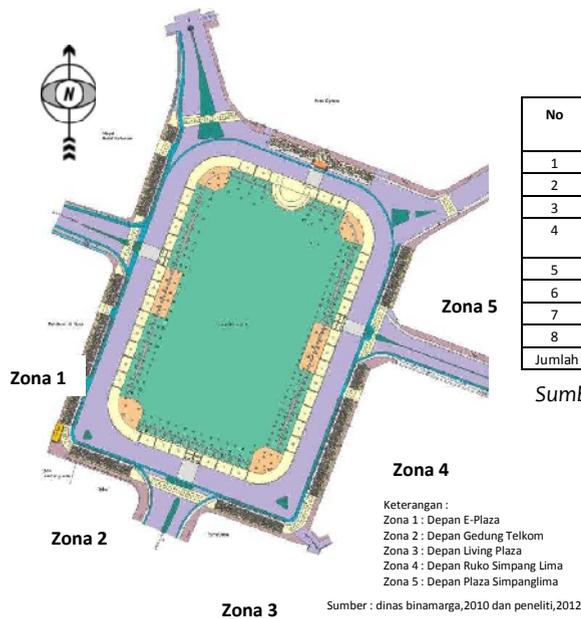


Sumber: Hasil Analisis, 2012

GAMBAR 2
SEBARAN SEKTOR FORMAL DI KAWASAN SIMPANGLIMA

Tahun 2010 di bawah kepemimpinan Soemarmo dilakukan penataan terhadap kawasan Simpanglima yang melibatkan penataan PKL, dimana PKL yang berjualan di Lapangan Pancasila

direlokasi ke Jalan Ki Mangunsarkoro dan Lapangan Pancasila direvitalisasi sebagai ruang terbuka publik. Sedangkan PKL yang menempati trotoar di bundaran Simpanglima ditata dengan memperbaiki sarana fisik dan menempati selter-selter yang disediakan oleh pemerintah kota. Pedagang kaki lima di kawasan Simpanglima tersebar di beberapa ruang trotoar, yaitu di sisi timur, selatan dan utara Lapangan Pancasila. Untuk memudahkan penelitian, maka PKL dibagi menjadi 5 zona, yaitu 1 zona di sisi barat (depan E-Plaza), 2 zona di sisi selatan (depan Gedung Telkom dan Living Plaza) dan 2 zona di sisi timur (depan Ruko Simpanglima dan Plaza Simpanglima). Berdasarkan SK Walikota Semarang No.511.3/16 tahun 2001 tentang penetapan lahan untuk lokasi PKL yaitu berputar dari depan kompleks pertokoan Simpanglima depan Ramayana Super Center, depan Masjid Baiturrahman, depan Plaza Simpanglima, depan Mall Citraland/Hotel Ciputra, pada pukul 16.00-04.00.



Sumber: Dinas Binamarga, 2010, Peneliti, 2012

GAMBAR 3
ZONASI PKL DI SIMPANGLIMA

TABEL 1
JUMLAH PEDAGANG KAKI LIMA
DI SIMPANGLIMA DAN PERSEBARANNYA

No	Lokasi	Jumlah PKL				keterangan
		2001	2002	2003	2012	
1	Depan Masjid Baiturrahman	10	38	42	-	
2	Depan Citraland	29	51	61	-	
3	Depan Plaza Simpanglima	69	74	83	40	Zona 5
4	Depan Kompleks Pertokoan Simpanglima	25	44	51	17	Zona 4
5	Depan Living Plaza	18	20	33	10	Zona 3
6	Depan Kantor Telkom	7	9	11	9	Zona 2
7	Depan E-Plaza	16	19	25	18	Zona 1
8	Lapangan Pancasila	671	1081	1230	-	
Jumlah		2846	845	1336	94	

Sumber: Dinas Pasar Kota Semarang,2012



Sumber: Hasil Analisis, 2012

GAMBAR 4
VISUAL PKL DAN PENGUNJUNG DI SIMPANGLIMA

FORMALISASI AKTIVITAS PKL DI SIMPANGLIMA

Berdasarkan hasil analisis, maka didapatkan temuan studi menurut sasaran yang dilakukan dalam penelitian ini.

Profil PKL

1. Umur pedagang, PKL yang berdagang di Simpanglima mayoritas tergolong usia produktif yaitu 18-55 tahun. PKL dianggap salah satu peluang lapangan usaha untuk mendapatkan pekerjaan ataupun penghasilan.
2. Asal pedagang, sebagian besar PKL yang berasal dari dalam Kota Semarang adalah PKL yang telah lama berdagang di Simpanglima. Saat itu pedagang dari Kota Semarang mencari

lokasi yang dianggap strategis untuk berdagang. Namun juga terdapat PKL dari luar Kota Semarang. Hal tersebut tarikan Simpanglima sebagai jantung Kota Semarang yang berpeluang mendatangkan pengunjung dalam skala luas.

3. Lama berdagang, PKL mulai berdagang di Simpanglima relatif sudah lama yaitu 11 hingga 20 tahun, bahkan terdapat pedagang yang berdagang di Simpanglima lebih dari 20 tahun. Hal tersebut tidak terlepas sejarah perkembangan PKL di Simpanglima yang dimulai pada tahun 1970an.
4. Latar belakang pendidikan, dengan berlatar belakang SD hingga SMU dimana tergolong pendidikan rendah hingga menengah. Hal tersebut dikarenakan untuk menjadi PKL tidak dituntut pendidikan yang tinggi serta membutuhkan ketrampilan yang relatif sederhana.
5. Pekerjaan sebelum menjadi PKL, sebagian besar PKL sebelumnya bekerja sebagai pegawai swasta. Besar kemungkinan mereka adalah sebagian dari korban PHK dari sektor formal pada saat Indonesia mengalami krisis moneter. Begitupun yang sebelumnya wiraswasta yang gulung tikar karena krisis moneter kemudian beralih menjadi PKL karena membutuhkan modal yang relatif minim.
6. Pekerjaan lain selain PKL, mayoritas PKL merupakan pekerjaan utama mereka untuk mendapatkan penghasilan yaitu sebanyak 85%. Sedangkan sisanya merupakan wiraswasta dimana PKL merupakan pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan. Bahkan beberapa PKL merupakan pemilik modal besar dengan memiliki beberapa lapak PKL.
7. Alasan menjadi PKL, banyak alasan yang diungkapkan PKL dan mayoritas alasan mereka menjadi PKL adalah sulit mencari pekerjaan di sektor formal. Lapangan pekerjaan yang minim, memilih untuk menjadi pedagang kaki lima (PKL) karena pekerjaan ini sesuai dengan kemampuan mereka.

Karakteristik Aktivitas PKL

1. Lokasi, PKL berlokasi di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Kota Semarang yang terbagi dalam 5 zona, yaitu Zona 1 depan E-Plaza, Zona 2 depan Gedung Telkom, Zona 3 depan Living Plaza, Zona 4 depan Ruko Simpanglima, Zona 5 depan Plaza Simpanglima.
2. Tempat usaha, PKL memanfaatkan sebagian trotoar untuk jalur pejalan kaki dan menempati shelter.
3. Jenis dagangan, mayoritas makanan dan minuman dan terdapat pengelompokan menurut menu makanan. Terdapat juga PKL cinderamata khas Semarang sebagai pendukung citra kawasan.
4. Sarana fisik dagangan, menempati shelter dengan sarana berdagang berupa almari pajangan, meja dan kursi yang seragam dan komunal. Terdapat pula gerobak dorong. Menciptakan visualisasi yang bersih dan tertata.
5. Pola pelayanan, waktu layanan terbagi 2 yaitu sore-malam serta 24 jam dan bersifat menetap.
6. Pendapatan/Omzet, pendapatan yang diterima oleh PKL pasca penataan mayoritas bertambah serta ada yang tidak berpengaruh. Namun ada yang sebagian kecil PKL merasakan pendapatannya menurun karena ada perubahan lokasi berdagang.
7. Sarana pendukung, tempat usaha PKL dilengkapi dengan fasilitas pendukung yang disediakan oleh Pemerintah Kota Semarang melalui pihak ketiga seperti listrik, air serta tempat sampah (kebersihan) dengan kompensasi biaya sebesar Rp 10.000,00.
8. Kegiatan usaha, PKL di Simpanglima terorganisir dengan baik melalui pembentukan paguyuban PKL yang beranggotakan para pedagang yang bertujuan untuk pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan tempat berdagang PKL.

Profil Pengunjung PKL

1. Asal pengunjung, mayoritas pengunjung PKL berasal dari dalam Kota Semarang, namun juga terdapat pengunjung dari luar Kota yang sedang melintasi Kota Semarang atau singgah di Kota Semarang. Hal tersebut dikarenakan Simpanglima merupakan jantung Kota Semarang yang menjadi magnet berkembangnya aktivitas kota, sehingga jangkauan pelayanan PKL sangat luas.
2. Tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan pengunjung relatif tinggi yaitu diploma/sarjana serta SMU. Hal tersebut dimungkinkan pengunjung berasal dari sektor formal di sekitar kawasan Simpanglima, baik yang bekerja maupun beraktivitas di sektor formal tersebut. Hal tersebut mengindikasikan bahwa barang dagangan PKL diminati oleh konsumen dari berbagai tingkat pendidikan.
3. Pekerjaan dan tingkat penghasilan, pekerjaan pengunjung yang bervariasi membuktikan bahwa konsumen PKL Simpanglima berasal dari segala jenis pekerjaan seperti pegawai swasta, pelajar serta wiraswasta dan tingkat penghasilan yang bervariasi pula. Dominasi tingkat penghasilan diantara 1-3 juta/bulan mengindikasikan bahwa pengunjung berasal dari golongan menengah ke atas.

Persepsi Pengunjung terhadap Keberadaan PKL

1. Alasan membeli barang dagangan PKL, menurut tingkat penghasilan pengunjung beralasan membeli barang dagangan PKL dikarenakan lokasinya yang berada di pusat kota sehingga strategis dan mudah untuk dijangkau. Selain itu, mayoritas juga dikarenakan oleh PKL yang mengelompok dengan barang dagangan sejenis dan alasan lainnya seperti untuk tempat berkumpul atau "kongkow".
2. Jenis barang dagangan yang dibeli, jenis barang dagangan yang diminati oleh pengunjung adalah makanan dan minuman dikarenakan barang dagangan yang didominasi oleh PKL adalah makanan-minuman yang penataannya dibuat mengelompok serta terdapat makanan khas Semarang.
3. Motivasi pengunjung, motivasi pengunjung untuk membeli barang dagangan PKL mayoritas dikarenakan jenis dagangan yang dijual yaitu makanan dan beberapa jenis makanannya berupa makanan khas Semarang. Selain itu, harga yang ditawarkan relatif murah sehingga masih terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah sekalipun menjadi salah satu motivasi konsumen.

Indikasi Formalisasi PKL

1. Kebijakan pemerintah terkait penataan PKL dianggap tidak tepat sasaran dikarenakan tidak adanya studi mendalam terkait karakteristik aktivitas PKL dalam perencanaan sehingga dalam pelaksanaan program telah merubah karakteristik asli PKL.
2. Penataan Simpanglima berimplikasi pada kenyamanan PKL dan pengunjung dalam beraktivitas. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan sarana berdagang untuk PKL maupun untuk pengunjung. Selain itu, perubahan stigma masyarakat yang semula menganggap barang dagangan PKL murah dan sederhana namun kini telah bergeser kearah perdagangan modern dengan harga yang relatif lebih mahal jika dibandingkan PKL sejenis di lokasi lain.
3. Adanya indikasi formalisasi PKL di Simpanglima berdasar karakteristik PKL yang mengarah pada ciri-ciri sektor formal yaitu dari aspek sarana berdagang, organisasi, kualitas barang dan omzet.

KESIMPULAN

1. PKL di Simpanglima merupakan salah satu dunia usaha yang telah lama berkembang dan menjadi salah satu alternatif mata pencaharian utama dikarenakan menurut ILO karakter PKL yang mudah untuk dimasuki oleh segala segmen latar belakang pendidikan dan tuntutan keahlian yang relatif sederhana. Seiring penataan PKL, telah terjadi pergeseran karakteristik PKL yang dapat dilihat dari aspek ekonomi, social-budaya maupun lingkungan.
2. Pengunjung PKL berasal dari segala jenis pekerjaan, tingkat penghasilan dan latar belakang pendidikan. Sehingga barang dagangan PKL diminati dari masyarakat golongan kelas menengah ke bawah hingga menengah ke atas.
3. Perseseran stigma masyarakat, PKL di Simpanglima dengan konsep pujaseranya mencitrakan bahwa barang dagangan PKL cenderung mahal dan modern. Namun, PKL di Simpanglima telah menjadi salah satu alternatif sebagai tujuan wisata kuliner sehingga harga tidak lagi menjadi bahan pertimbangan untuk membeli barang dagangan PKL.
4. Adanya indikasi formalisasi PKL yang telah merubah karakteristik asli PKL yaitu beberapa karakteristik PKL yang bercirikan sektor formal.

Indikasi formalisasi tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari solusi dimana PKL tidak lagi dinilai dari sudut pandang permasalahan kota, namun menjadi pertimbangan pemerintah untuk tetap mempertahankan eksistensinya dengan mengakui keberadaan mereka. Melalui kebijakan pemerintah dengan cara penataan kawasan melalui penyediaan tempat berdagang dan mengumpan balik dengan kewajiban PKL dengan membayar pajak. Maka tercipta hubungan yang saling menguntungkan. Selain itu, peran aktif dan dukungan dari segala pihak seperti PKL itu sendiri, pemerintah, sektor formal dan masyarakat mutlak dibutuhkan. Sinergi antar sektor tersebut juga harus dibangun dalam rangka pemaknaan formalisasi dalam arti yang luas untuk tujuan peningkatan kemakmuran dan perkembangan penataan kota yang berkelanjutan. Beranjak dari fenomena yang ada terkait dengan PKL, sudah seharusnya pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam tata ruang perkotaan lebih memperhatikan karakteristik PKL. PKL dapat menjadi aset yang besar dalam menggerakkan roda perekonomian suatu perkotaan, terlebih Kota Semarang sebagai ibukota propinsi yang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah dalam menghadapi fenomena tersebut adalah dengan lebih mempertimbangkan karakteristik siapa, apa, bagaimana obyek penataan. Baik dari segi PKL, pengunjung, sektor formal atau kegiatan utama yang berada di sekitarnya sehingga lebih terintegrasi dengan baik dan saling menunjang antar sektor dengan sektor lainnya.

Selain itu, perlu adanya penegasan dalam peraturan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan walaupun telah ada antisipasi terhadap kebijakan tersebut. Namun ketidaksesuaian antara peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya, dapat mematik rasa ketidakadilan PKL yang berlokasi di wilayah lainnya untuk menuntut perlakuan yang sama.

Dari sisi masyarakat dalam hal ini PKL, direkomendasikan untuk memiliki struktur pengelolaan yang lebih jelas dan tegas. Sehingga ketika menghadapi kebijakan pemerintah yang terkait dengan penataan PKL memiliki bargaining position antara kedua belah pihak. Kemudian akan ada saling memberi input diantara keduanya sehingga tidak ada ketimpangan di kedua belah pihak dan suara keinginan PKL dapat terwadahi dan tersalurkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mustafa, Ali Achsan. 2008a. Transformasi Sosial Masyarakat Marginal: Mengukuhkan Eksistensi Pedagang Kaki Lima dalam Pusaran Modernitas. Malang: In-TRANS Publishing.
- _____. 2008b. Model Transformasi Sosial Sektor Informal: Sejarah, Teori dan Praksis Pedagang Kaki Lima. Malang: In-TRANS Publishing.
- Nasir, Mohammad. 1988. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rukmana, Deden. 2005. Pedagang Kaki Lima dan Informalitas Perkotaan. Available at <http://www.uplink.or.id/content/view/212/68/lang,id/>. Diakses pada tanggal 16 Mei 2006.
- Simanjutak, Payaman J. 1989. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta: Lembaga Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Soetomo, Soegiono. 1997. Industri Informal dari Struktur Keruangan Pedesaan ke Perkotaan di Kotamadya Semarang. Teknik, Tahun XVIII Ed. 2-Agustus.
- Widjanti, Retno. 2009. Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima pada Kawasan Komersial Pusat Kota (Studi Kasus: Simpang Lima, Semarang). Teknik. Vol.30, Oktober, hal. 162-170.
- Widjanti, Retno dan Octora L.S. 2007. Karakteristik Berlokasi Pedagang Kaki Lima di Sekitar Fasilitas Kesehatan di Kota Semarang. Tataloka, Vol. 9, Juli, hal. 205-231.
- Yustika, Ahmad Erani. 2000. Industrialisasi Pinggiran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.